

PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

(Studi Kasus Implementasi Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan
Petani Dan Nelayan Kecil (P4K) di Kabupaten Jombang)

*Local Development and Poverty Alleviation (Case Study of Implementation of the Farmer
and Fisherman Income Improvement Project (P4K) in the Jombang Regency)*

Affandi

Mahasiswa PMIAP, PPSUB, Malang /
Staf Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Sumartono dan Solichin Abdul Wahab

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, UB, Malang

ABSTRAK

Pentingnya program pemberdayaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan, salah satunya Program P4K adalah agar lingkaran setan kemiskinan dapat diputus sehingga kemakmuran dan implementasi pembangunan menampakkan hasil yang nyata. Dalam pembangunan di Indonesia, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan telah dijadikan titik sentral, dimana program tersebut dijalankan secara serentak dan terkoordinir di daerah-daerah yang dikenal dengan kegiatan Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah (Program P4K) dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan bagaimana pembangunan dalam memberdayakan petani dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan petani serta upaya-upaya dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah dalam melaksanakan Program P4 dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan (Program P4K) dalam rangka penanggulangan kemiskinan; (2) mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan dalam memberdayakan petani sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan petani, serta mengetahui upaya-upaya dan hambatan-hambatan pelaksanaan Program P4K dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, Program P4K sebagai upaya pemberdayaan kaum miskin pedesaan dengan pemberian bantuan modal, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk membuka usaha baru dan industri kecil lokal. Keberhasilan Program P4K di Kabupaten Jombang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu Program P4K banyak diikuti kaum perempuan petani, sehingga kemampuan petani dalam memanfaatkan dan menyerap dana bantuan P4K sangat tinggi ditunjukkan banyak KPK yang antri untuk memperoleh bantuan atau peningkatan dana bantuan. Orientasi pembangunan dengan tujuan memberdayakan masyarakat berhasil dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam masyarakat. Keberhasilan Program P4K di Kabupaten Jombang tidak lepas dari partisipasi dan komitmen yang tinggi Pemerintah dan Masyarakat untuk melakukan pembinaan terus menerus dan berkelanjutan, di samping aspirasi dan inisiatif masyarakat diutamakan dalam pelaksanaan Program P4K. Inisiatif petani dalam memanfaatkan Program P4K sangat tinggi dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang mandiri.

Kata kunci: Kemiskinan, pembangunan daerah

ABSTRACT

The importance of empowerment programs in poverty alleviation, as P4K program, is to cut satanic circle of poverty, so prosperous and development implementation can give real result. In Indonesian development, poverty alleviation and empowerment have been the central points, where these programs were implemented simultaneously and coordinated at local areas that known as the Farmer and Fisherman Income Improvement Project (P4K). The research problem is how implementation of the Local Government development policy (P4K) program is implemented in alleviating poverty and how the development in empowering farmer can enhance farmer's understanding and knowledge, and what efforts and obstacles that faced by local government when implement the program in coping poverty at Jombang Regency.

Goals of this research are: (1) to describe and analyze implementation of development policy (P4K program) in alleviating poverty, (2) to describe and analyze the development in empowering farmer so can improve farmer's understanding and knowledge and to know efforts and obstacles that faced by local government when implement the program in alleviating poverty in Jombang Regency.

Using qualitative approach, this research conclude that, P4K program as efforts to empower village poor people with giving capital aid, used by villager to establish new business and local industry. The success at Jombang Regency has its own characteristic, that is, the program was participated by women farmer, so farmer's ability in use and absorbing P4K aid fund is very high, indicated by the queue of KPKs to receive aid fund. Development orientation that aimed at empowering of society is success with consider the society important aspects. Success of the P4K at Jombang Regency are related with the high participation and commitment of local government and society to establish ongoing and continue founding, beside society aspiration and initiative that given priority in that implementation. Farmer's initiatives in use P4K program is very high with established of stand alone group.

Keywords: Poverty, local development

PENDAHULUAN

Di negara-negara berkembang yang perekonomiannya masih mengandalkan pada model-model tradisional (pertanian / agraris) dan sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan, hampir 80% lebih, proses-proses pembangunan jelas diarahkan pada pemberdayaan daerah-daerah lokal (pedesaan). Pada awalnya orientasi pembangunan yang dipengaruhi sistem pemerintahan yang sentralistik, model pembangunan ini kurang mendapat perhatian. Ditunjang kemajuan informasi dan berkembangnya peradaban sosial ekonomi masyarakat dunia ketiga pembangunan dengan isu desentralisasi disamping sentralisasi saat ini begitu populer dibicarakan.

Menurut Todaro (2000), upaya-upaya pemberdayaan daerah (lokal) dalam pembangunan pada akhirnya akan dituju kan pada kondisi: Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok-seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa. Di samping itu juga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan

sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghambat dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Secara nyata tindakan tersebut akan berwujud pada pelayanan publik yang dapat diberikan oleh lembaga-lembaga yang terdesentralisasi, dengan tidak mengurangi porsi pemerintahan dalam kewenangan politiknya (legitimasi Pemerintah dimata masyarakatnya). Tjokroamidjojo (1990) menyatakan bahwa: "Pembangunan itu disamping mempunyai tujuan, juga berencana dan rencana itu menggambarkan pertumbuhan yang tetap dan stabil". Jadi perencanaan itu sendiri merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan yang dinamis, yang dalam hal ini harus dibedakan dengan pengertian perubahan meskipun sama-sama terjadi pergerakan yang dinamis. Penetapan tujuan dan cara yang terbaik mencapai tujuan itu berdasarkan sumber daya dan dana yang ada serta mampu dikerahkan. Sudah barang tentu dalam penentuannya tergantung pula dari nilai politik, sosial dan ekonomi yang dianut oleh masyarakat bangsa tertentu.

Proses pembangunan tidak sepenuhnya berdampak positif, disamping itu, akan terjadi bias-bias seperti munculnya pemborosan karena proses pemeliharaan pembangunan yang terabaikan (Riggs, 1988). Kendala tersebut perlu diantisipasi dengan adanya proses pembangunan yang terintegrasi dan administratif pembangunan yang efisien. Kondisi ini sering terjadi di negara-negara dunia ketiga karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dan birokrasi yang tidak mengutamakan kepentingan umum. Karena itu birokrasi dan aparatur negara sangat berperan agar tercapainya sasaran pembangunan. Ke-kuasaannya dalam menciptakan kebijakan dan menyampaikan kemauan perlu dikendalikan dan direncanakan, sehingga proses pemba-

ngunan dapat dijalankan dengan lancar. Selanjutnya Tjokroamidjojo (1990) menyatakan:

"Perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan politik. Kebijakan dan program tersebut dapat dituangkan dalam suatu rencana kebijakan pembangunan atau merupakan suatu rangkaian kebijakan dan program yang konsisten".

Dalam rangka peningkatan kelancaran peyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan masyarakat diperlukan institusi Pemerintah Daerah yang mampu menampung komunikasi dan informasi yang kompleks dengan masyarakatnya. Organisasi dinyatakan sebagai suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerja sama dari dua orang atau lebih sesuatu yang berujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mempunyai hal hubungan-hubungan (Sutarto, 1991), tentunya perlu diatur dan dikendalikan dengan mekanisme aturan. Jadi untuk dapat melaksanakan tujuan organisasi secara efektif dan efisien menuntut adanya kerja sama agar kebutuhan dan harapannya dapat dipenuhi. Dengan begitu, organisasi tentunya membutuhkan anggota organisasi yang berkualitas supaya organisasi dapat mencapai sasaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan Daerah sebagai organisasi formal terdiri dari komponen-komponen organisasi yang diatur antara pusat dan daerah dalam rangka asas desentralisasi. Daerah sebagai kesatuan wilayah yang terdesentralisasi merupakan daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya daerah otonom tersebut, maka sebagai konsekuensi yaitu penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setingkat untuk dijadikan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Masing-masing daerah akan memiliki kewenangan sebagai modal

utama dalam penyelenggaraan pemerin tahannya. Tujuan daripada desentralisasi pada intinya adalah agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar tanpa meninggalkan aspek pendemo-krasian. Menurut Van Braam (Soewar-gono, 1995) fungsi utama pemerintahan adalah regeren yaitu menetapkan ke-bijakan-kebijakan dalam rangka mengga-lang kekuatan-kekuatan kemasyarakatan untuk mencapai tujuan negara. Tiga aspek utamanya adalah; Aspek Material, Aspek formal dan Aspek Politik.

Aspek Material berarti pemerintah daerah dalam memerintah menetapkan kebijakan-kebijakan atau keputusan-kepu-tusan yang sifatnya mengikat, disebut ke-putusan-keputusan publik. Aspek formal memerintah identik dengan membuat keputusan-keputusan politik yang disebut keputusan administrative yang dijabarkan dari keputusan-keputusan politis, akan tetapi telah dibebaskan dari agenda politik (deipolitisasi) dan selanjutnya mengalami teknisasi. Sedang aspek politik, Peme-rintah menjalankan kekuasaan yang dibe-rikan oleh negara, dari sudut demo-kritisasi, kekuasaan tersebut berasal dari rakyat, sehingga aparat penyelenggara pemerin-tahan / negara berarti menja-lankan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Jadi apabila semua aspek tersebut dapat dijalankan dan diorientasikan kepada kesejahteraan rakyat maka imple-mentasi penyelenggaraan pemerin-tahan sesuai dengan teori pemerintahan.

Pada dekade tahun 1970-an, seba-gian besar negara-negara berkembang mengalami kemajuan dalam memperbaiki perekonomiannya. Perubahan itu, bagi Indonesia menghadapi masalah dalam pembangunan ekonominya yaitu terlilit krisis hutang dan kekurangan pangan. Untuk menghadapi kondisi tersebut maka diperlukan adanya sektor publik yang kuat, kebijakan ekonomi makro yang efektif dan peningkatan kualitas sumber-daya manusia yang kesemuanya merupa-kan tantangan di masa depan. Arus globalisasi yang memberikan tekanan eksternal mempengaruhi stabilitas yang kemudian

ditambah pula dengan munculnya gerakan reformasi: tuntutan, bahwa tidak semua urusan publik/masyarakat dapat diurus negara, publik malahan dapat mengurus dirinya (Jones, 1991).

Pemerintah daerah sangat penting untuk memberdayakan diri (empo-werment) dan meningkatkan kesejah-teraaan masyarakat lokal/daerah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat miskin yang sebagian besar masih me-warnai kehidupan masyarakat Indonesia karena kepincangan sistem yang ada selama ini. Masyarakat miskin yang sebagian besar tinggal di daerah meru-pakan mikro organik yang sepanjang masa menjadi agenda pokok Pemerintah Daerah dan Program-program Pempa-ngunan di daerah. Berangkat dari kondisi tersebut maka pemberdayaan dan pemba-ngunan yang berorientasi ke bawah sangat diperlukan dalam rangka mening katkan kesejahteraan masyarakat, lebih-lebih bagi masyarakat yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Bryant dan White (1987) menggaris bawahi bahwa untuk menuju keberhasilan pembangunan berarti pe-numbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak yang lebih besar kepada si miskin. Satu-satunya cara adalah mencip-takan mekanisme dari dalam (built-in) guna meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang tidak adil menjadi rakyat mempunyai pengaruh.

Fenomena kemiskinan pada dasar-nya masih merupakan persoalan klasik di dunia ketiga termasuk Indonesia. Menurut Sumodiningrat (2001), masalah kemiskinan merupakan tantangan pembangunan dunia ketiga. Kemiskinan di Indonesia adalah kesenjangan kronis sejak 1960-an yang diperparah dengan adanya krisis sejak 1997. Kebijakan reguler sektoral dan regional sejak 1970-an hingga saat ini ternyata belum menurunkan jumlah penduduk miskin karena pada tahun 2001 masih berkisar 40 juta jiwa.

Di Kabupaten Jombang sendiri jumlah masyarakat miskin mencapai 105.527 Kepala Keluarga (KK) dari 291.266 KK di Kabupaten Jombang

sekitar 36,17%. Permasalahan pokok bagaimana jumlah tersebut dapat dihilangkan atau paling tidak dapat dikurangi guna mencegah dampak kemiskinan yang lebih parah di masa datang. Kemiskinan yang mencapai nilai 36,17 tersebut di Kabupaten Jombang kenyataan melebihi angka kemiskinan Nasional pada tahun 2000, sehingga upaya-upaya kuratif sangat perlu dilaksanakan, terutama kemiskinan di daerah perdesaan yang selalu menempati jumlah yang besar di banding kemiskinan kota yang melanda Indonesia.

Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah (Program P4K) dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang?

Bagaimana pembangunan dalam memberdayakan petani dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan petani?

Upaya-upaya dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan Program P4 terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang.

Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan (Program P4K) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang?
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan dalam memberdayakan petani dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan petani?
3. Mengetahui upaya-upaya dan hambatan-hambatan pelaksanaan Program P4 dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai

"Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada situasi dan individu tersebut secara holistik (utuh), dalam hal ini peneliti tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong, 1989). Sesuai dengan perkembangan di lapangan, sifat pendekatan kualitatif yang lentur, mengikuti pola pemikiran yang bersifat empirical inductive, di mana sesuatu dalam penelitian ini, nantinya akan ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

Wawancara Mendalam (*indepth interview*), pada tahap ini peneliti dengan mengurangi formalitas mendatangi informan dengan mempertimbangkan agar tidak mengganggu rutinitas informan yang diwawancarai, peneliti datang langsung ke tempat informan berada baik di tempat kerja maupun di rumah. Semata-mata berkunjung biasa peneliti menggali informan yang relevan dengan kondisi informan dengan apa adanya.

Studi Dokumen, guna mendukung proses penggalan informasi peneliti memperkaya informasi yang masuk dengan membaca dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian

Desa Diwek sebagai lokasi dari penelitian ini seperti umumnya desa-desa di Kabupaten Jombang yang tidak jauh dari Kota Kabupaten merupakan desa yang bernuansa agamis dan tradisional.

Desa ini masuk wilayah Kecamatan Diwek sebagai bagian dari Pemerintahan Kabupaten Jombang. Profil lokasi penelitian ini tidak jauh berbeda dengan profil desa lain di Desa Diwek mempunyai luas 3 km² dan mempunyai ketinggian daerah dari permukaan laut 20 dpl (Dari Permukaan Laut) serta ketinggian rata-rata permukaan tanah kurang dari 500 (meter), Desa ini terletak 6 km dari arah selatan dari Kota Kabupaten Jombang. Ditinjau dari jarak dengan Kota Kabupaten yang tidak terlalu jauh, maka Desa Diwek mudah dikembangkan dan berpotensi untuk maju. Luas tanah di Desa Diwek sebagian besar berupa tanah sawah 149 Hektar, Tanah Pekarangan 80 Hektar serta tanah kering lainnya 10 Hektar.

Penduduk Desa Diwek per tahun 2000 terdiri dari laki-laki 2050 jiwa dan perempuan 3.266 jiwa. Terdiri dari 924 rumah tangga dengan tingkat rata-rata penduduk per rumah tangga sebesar 5 jiwa per rumah tangga terdiri dari Kewarganegaraan WNI dan WNA, dengan tingkat kelahiran rata-rata pada tahun 2000 mencapai 32 jiwa pertahun. Angka kematian di Desa Diwek pada tahun 2000 mencapai 20 pertahun sehingga bila dikaitkan dengan tingkat kelahirannya terdapat pertumbuhan penduduk pada 1997 di Desa Diwek sebesar 12 pertahun. Kategori Rumah Tangga di Desa Diwek adalah 172 masuk kedalam Pra Sejahtera 112 ke dalam kemiskinan I, 356 Kemiskinan II dan 326 masuk pada kemiskinan III, serta 130 masuk kategori Kemiskinan III Plus yang secara keseluruhan terdiri 924 KK (Kepala Keluarga).

Penduduk Desa ini berusaha di bidang Pertanian yang menghasilkan padi dan komoditi lain. Pada tahun 2000 luas panen di tempat ini mencapai 103 hektar dengan kapasitas produksi sebesar 700 ton, dari sini terdapat produktifitas sebesar 6,80 ton/hektar. Hasil-hasil pertanian terbesar di Desa Diwek selain padi terdiri tanaman Jagung, Kedelai Kacang Tanah, Kacang Hijau dan

tanaman lahan kering lainnya. Di samping bertani penduduk Desa Diwek banyak yang berternak dan berdagang. Hasil ternak yang dibudidayakan selain ternak besar dan kecil juga unggas dan budidaya ikan air tawar. Juga terdapat industri kecil yang mampu memproduksi senilai dengan Rp. 49.100.000,00 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 70 orang dari industri kecil yang ada di wilayah tersebut.

Hasil penelitian

Munawaroh dengan bahasanya yang campuran bahasa jawa dan Indonesia mengungkapkan antusiasnya dalam mengikuti P4K. Dengan menggebu Munawaroh menyatakan kegembiraannya memperoleh bantuan dari P4K, meskipun sebelumnya menunggu lama tetapi tidak membuat munawaroh kecewa untuk tetap mengikuti P4K. Ungkapan tersebut didukung pula oleh suaminya sewaktu mendampingi wawancara, suami munawaroh mendukung pula kemauan istrinya karena dirinya sebagai petani tidak sepanjang tahun mampu memperoleh penghasilan karena tergantung pada waktu panen dan musim tanam saja untuk bekerja di bidang pertanian.

Program P4K, sebagai program guna menciptakan kemandirian bagi masyarakat untuk berusaha, berorientasi kepada terciptanya kerja sama kelompok inisiatif dan inovatif kelompok agar kelompok-kelompok tersebut mampu bersimbiosis dengan masyarakat lain. Inisiatif yang tinggi dan kemauan untuk mengikuti program P4K ditunjukkan oleh Tiani yaitu:

“Kulo rumiyin, kintun piyambak tumut kumpulan niki, kula diajak Mbak Munawaroh, malah kulo sakniki dipun pasrahi bukunipun kumpulan, margi dipun percados kalian kumpulan nggih kula cepeng, nggih kula catet menawi inten inkang yaur, jane kula nggih ajreh menawi klentu, pripun malah lha wong kulo dipun percoyo, kulo nggih untung, (saya dulu, paling belakang ikut perkumpulan ini, saya diajak Mbak

Munawaroh, dan sekarang saya diserahkan pencatat (sekretaris) karena dipercaya, saya catat setiap angsuran yang dibayar, sebenarnya saya takut salah, bagaimana pun saya dipercaya, saya juga untung),“ (hasil wawancara dengan Tiani, 24 September 2001).

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilaksanakan di Desa Diwek terlihat bahwa selaku PPL bertugas untuk memotivasi, membangkitkan rasa percaya diri dan menumbuhkan kemandirian masyarakat, pihak PPL dalam tugasnya memberdayakan masyarakat selalu berusaha untuk memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendiskusikan dan mempertimbangkan setiap ide atau program yang mereka rancang untuk kepentingan masyarakat (KPK). Untuk itulah PPL memberikan kebebasan pada KPK untuk membuat pilihan dan menentukan usaha apa yang mereka inginkan untuk memperbaiki kehidupannya.

Kartasasmita (1996) mengisyaratkan perlunya pembaharuan dalam cara kerja, etika dan semangat birokrasi, di antaranya peran aparatur negara sudah bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan dan dari memberi menjadi memberdayakan diiringi pengembangan keterbukaan dan keberanggungjawaban. Pendekatan di atas kiranya perlu direnungkan oleh aparat pemerintah mengingat bahwa berbagai kebijakan pembangunan selama ini tidak menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah.

Persepsi bahwa kelompok masyarakat kemiskinan di pedesaan menjadi kelompok yang lemah dalam inisiatif tidak terbukti. Meskipun kemiskinan materi, tetapi mereka tidak kemiskinan dalam hal kemauan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi, bahkan mereka juga memiliki jiwa kewiraswastaan dan keterampilan teknis untuk mengatasi problema yang mereka hadapi. Proses pemberdayaan mengandung kecenderungan, proses pemberdayaan yang menekankan kepada

proses memberikan atau mengalihkan sebagian daya atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pemba-ngunan kemandirian masyarakat melalui organisasi.

Pelaksanaan Program P4K berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk membentuk KPK dengan dukungan pembinaan PPL sehingga masyarakat petani kemiskinan dan keluarganya dapat terangkat derajat hidup dan kesejahteraan teraannya. Usaha tersebut diarahkan kepada upaya mencegah atau menghindarkan orang-orang yang potensial menjadi kemiskinan melalui kegiatan penyuluhan sosial dan mendorong perluasan partisipasi dari masyarakat sehingga muncul daya dan inovasinya.

Penyuluhan sosial, dilakukan dengan memberikan penjelasan atau informasi kepada berbagai kalangan di masyarakat luas baik secara perorangan, kelompok maupun kelembagaan tentang masalah kemiskinan dan upaya penanggulanganannya. Tujuan kegiatan penyuluhan ini ialah mencegah makin berkembangnya kemiskinan beserta pengaruh negatifnya di masyarakat luas serta mendukung upaya meniadakan kemiskinan di semua daerah perkotaan. Berkaitan dengan keterlibatan dan upaya yang dilakukan Anna sebagai petugas PPL, menyatakan:

“ Banyak KPK meskipun, belum sempat memperoleh penyuluhan mereka mampu membentuk kelompok karena informasi dari KPK yang sudah ada. Kalau seperti itu kita tinggal membantu memproses administrasinya, meskipun tidak langsung, tetapi rata-rata kemauan mereka sangat tinggi Ada KPK yang Tanya Bu Anna kenapa bunganya kok tinggi tetapi mereka tetap tertib dan tidak ada KPK binaan saya yang nakal, mungkin mereka takut tidak memperoleh bantuan tahun berikutnya”, (Wawancara, 23 September 2001).

Dari ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa kemauan masyarakat

dan keterlibatan mereka sangat tinggi, terbukti meskipun belum memperoleh penyuluhan tentang P4K mereka merespon dengan baik informasi dari teman maupun informasi dari KPK yang sudah berjalan. Khotimah mengungkapkan pengalamannya sebelum mengikuti Program P4K yaitu:

“ Saya dulu kumpulan tetangga-tetangga saya yang mau ikut kumpulan katanya kalau kita dapat mengumpulkan 10 orang akan mendapat bantuan dana, karena saya membutuhkan dana untuk usaha, saya cepat-cepat mengumpulkan teman-teman, alhamdulillah, sekarang sudah jalan dan Bu Mantri mendukung sekali”, (wawancara 25 September 2001).

Kemauan Khotimah ternyata sangat tinggi, sehingga untuk memperbaiki hidupnya Ia rela bersusah payah membentuk kelompoknya sudah sepiasnya Ia oleh kelompoknya ditunjuk sebagai ketua kelompok (Ketua KPK).

Program P4K sebagai program yang bermakna pemberdayaan dalam jangka panjang tidak diberikan permanen kepada KPK yang ada, akan tetapi karena terbatasnya sumber dana yang dialokasikan maka program ini juga bersifat stimulus, sehingga KPK yang telah berhasil dan mapan sumber bantuan yang diberikan akan dialihkan kepada KPK baru lainnya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Mohtar Efendy dalam informasi berikut:

“ Ada KPK tetapi tidak di Diwek ini dimana semua Anggota sepakat tidak lagi memperpanjang masa bantuannya, ternyata kelompok tersebut telah memiliki tabungan sendiri dan dapat digunakan anggota yang membutuhkan. Hal ini bisa saja, mungkin kelompok seperti itu telah berhasil dalam bekerja sama dan saling memahami antar anggotanya, oleh karena itu kalau bisa semua KPK yang ada sekarang seperti itu sehingga dana yang ada terus berputar dan dapat dialokasikan kepada KPK baru di Jombang ini”, (Wawancara tanggal, 20 September 2001).

Aspek penting dari pelaksanaan Program P4K

Pendidikan, merupakan upaya pemberian pengetahuan dalam bidang manajemen usaha kecil dan bagaimana membebaskan diri dari kemiskinan dan ketergantungan. Di samping diberikan beberapa wawasan tentang kewiraswas-taan, pemasaran, pembukuan maupun manajerial secara sederhana. Hal ini dipandang perlu untuk disampaikan karena keberhasilan berusaha juga tidak lepas dari produksinya itu sendiri, disertai pemasaran dan manajerialnya.

Bantuan modal kerja, yaitu berupa pemberian modal kerja baik dalam bentuk modal uang yang disalurkan berupa kredit yang dapat diangsur maupun untuk memperoleh alat produksi. Bantuan Modal dalam bentuk ini dirasakan sangat membantu bagi usaha KPK. Seperti yang disampaikan oleh Mutrofin yaitu:

“Usaha saya perkembangannya sangat baik sehingga saya merasa sangat diuntungkan, dan saya juga aktif mengembalikan angsuran saya, pokoknya menurut saya buncu (modal) saya tidak boleh hilang dan harus tetap saya usahakan, agar saya dapat menyekolahkan anak-anak saya lebih tinggi dari usaha saya ini” (wawancara, 24 September 2001).

Pembinaan mental, yaitu berupa penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan iman dan kesadaran dalam kehidupannya. Penyuluhan di bidang keagamaan khususnya agama Islam dilakukan dengan maksud mempertebal keimanan dan keyakinan, serta meningkatkan kepatuhan menjalankan syariat agama Islam seperti sholat, berpuasa dan zakat. Dengan menggunakan sarana Masjid setempat beberapa KPK bertemu dan saling tukar informasi.

Pembinaan tentang sosial kemasyarakatan penting untuk disisipkan, juga diberikan dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hidup bermasyarakat. Dari sini akan muncul kesa-

darang untuk tidak menyalahgunakan kesempatan serta mengusahakan bantuan dengan baik. Srianti mengungkapkan bahwa:

“Kulo ajreh menawi neko-neko kalian bunci ingkang kulo cepeng, soale menawi enten nopo-nopone sami mawon kalih maling”(Saya takut bila meyalahgunakan modal yang saya pegang, karena kalau ada apa-apanya saya sama dengan pencuri).

Sebagai Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil, Kegiatan yang dapat memperoleh bantuan tidak hanya dari usaha pertanian, akan tetapi perdagangan, industri, bengkel dan kerajinan. Hal ini disebabkan banyak petani di pedesaan berstatus petani tetapi tidak memiliki lahan. Mereka menyebut dirinya Petani karena di saat usaha pertanian sedang membutuhkan tenaga mereka (masyarakat desa dan sebagian KPK), mereka terjun di usaha pertanian. Sebaliknya apabila usaha pertanian sedang menunggu masa panen muncul pengangguran teknis, sehingga mendorong mereka mencari usaha lain guna mengisi kekosongan aktifitas di bidang pertanian. Berkaitan dengan usaha anggotanya, Munawaroh menginformasikan bahwa:

“Anggota kulo engkang jaler menawi bonten teng sabin katah eingkng merman, inten ingkang bengkel ging enten engkang mboro teng kitho, tapi tanggungan meraka sae sedanten.” (Anggota saya yang laki-laki kalau tidak ke sawah banyak yang kerja serabutan, ada yang bengkel dan pergi ke kota, tetapi angsuran mereka lancar semua).

Para migran menurut Todaro (1979) menaruhkan harapan yang begitu tinggi dalam kehidupan di kota. Di kota tersedia bermacam-macam pekerjaan sehingga memberikan peluang bagi seseorang untuk memilih alternatif pekerjaan daripada di desa yang satu-satunya mengandalkan usaha pertanian. Adanya

kemudahan untuk menjangkau daerah perkotaan dari daerah pedesaan karena telah terbangun infrastruktur berupa jalan beraspal dan tersedianya alat transportasi telah memberikan akses yang begitu besar bagi terjadinya urbanisasi (Mabogunje dalam Kanto, 1998).

Sejalan dengan yang ditemukan dalam penelitian Alkostar (1980) penduduk desa yang pindah ke kota umumnya memiliki pendidikan yang rendah. Rata-rata hanya berpendidikan Sekolah Dasar, hanya sedikit yang berpendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi, dan bahkan ada juga yang tidak mengenyam pendidikan alias buta huruf. Keterampilan yang mereka miliki pun juga terbatas, umumnya hanya memiliki keterampilan bertani sesuai dengan latar belakang kehidupan sebelumnya. Karena itu sebagian besar dari mereka tidak dapat diserap oleh lapangan kerja setempat.

Menjadi miskin jelas merupakan suatu keterpaksaan. Blau (1992) dalam penelitiannya menemukan bahwa kemiskinan itu terjadi karena keterbatasan pilihan yang tersedia. Keterbatasan itu meliputi keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan, meningkatkan penghasilan, memiliki tempat tinggal maupun keterbatasan lainnya. Menurut pandangan Blau adanya kesan atau mitos pada masyarakat yang memberikan cap negatif kepada kemiskinan sebagai orang yang malas, sakit mental itu tidak benar. Justru karena adanya perubahan-perubahan politik dan ekonomilah mendorong terjadinya kemiskinan semakin besar. Jadi tidak berkembangnya usaha-usaha dipedesaan karena kekuarangan modal menimbulkan kemiskinan di pedesaan, sehingga apabila tidak ada upaya untuk menanggulangnya, tentu, masyarakat desa akan tetap terbelenggu dengan kemiskinan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang agar pelaksanaan Program P4K berjalan dengan baik salah satunya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan petugas PPL di lapangan. “Saya dua minggu sekali rapat di Dinas untuk membahas permasalahan yang kita hadapi

dalam menjalankan tugas, (hasil wawan cara dengan Anna, petugas PPL di Desa Diwek). Sebagai program yang meyalurkan bantuan berupa uang pada intinya P4K rentan terhadap penyalahgunaan baik ditingkat pelaksana maupun si penerima bantuan oleh sebab itu guna mencegah terjadinya peyalahgunaan oleh Petugas lapangan, mereka diharuskan membuat laporan setiap hari dan setiap minggu membuat laporan ke Dinas. Mekanisme ini ditujukan agar hambatan pelaksanaan P4K sedini mungkin dapat diantisipasi dan apabila terjadi hambatan, Petugas Lapangan dengan cepat dapat berkonsultasi dengan Dinas Pertanian sebagai induknya.

Berkaitan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan P4K Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Drs. Soeharto, M.Si. Menyatakan bahwa:

“Setiap Petugas yang ditempatkan harus melaporkan kegiatannya Kepada Pimpro dan Pimpro membuat laporan kemajuan setiap minggu kepada Dinasnya. Dari situ kita akan mudah memantau perkembangan P4K. Kita tidak mau Program P4K mendapat masalah seperti program-program yang lain.”

Apa yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang tersebut dipertegas bahwa Program P4K diharapkan betul-betul program yang mampu memberdayakan masyarakat dan memunculkan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi tergantung kepada pemerintah. Lebih dari itu harapan Pemerintah dengan Program P4K mampu memberikan kontribusi bagi Pemerintah apabila program ini telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jombang.

Secara Internal kendala yang dihadapi berjalannya Program P4K adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa, sehingga untuk memberi pengertian dan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya mengikuti P4K dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga

formal tingkat Desa. Peyuluhan yang bersifat umum akan disampaikan di Balai Desa, hal inipun dirasa kurang berhasil sehingga banyak PPL yang melakukan penyuluhan dari pintu ke pintu atau komunitas masyarakat mudah ditemui.

Tingkat pendidikan yang rendah yang melingkupi masyarakat, merupakan fenomena tersendiri karena masyarakat desa dan miskin hanya berfikir bahwa hidup untuk mencari nafkah, tanpa disadari bahwa pendidikan yang memadai merupakan upaya bagi mereka untuk mentas dari kemiskinan. Program P4K selain meningkatkan taraf hidup masyarakat juga merupakan upaya pendidikan bagi masyarakat untuk berupaya dan berusaha mandiri, sehingga masyarakat perlu diyakinkan dan ditingkatkan pengetahuan mereka yang pada gilirannya masyarakat mampu untuk mengakses pembangunan dan hasilnya.

Ditinjau dari segi keuangan, selama pelaksanaan P4K di Kabupaten Jombang belum diketahui adanya penyalahgunaan keuangan baik tingkat eksekutor dan masyarakat desa. Hal ini sebagai bentuk keberhasilan P4K di Kabupaten Jombang. Apabila melihat bentuk-bentuk bantuan banyak disalahgunakan selama ini Program P4K telah dilengkapi dengan mekanis bertahap. Masyarakat atau KPK tidak secara langsung diberikan bantuan sesuai dengan permintaan mereka, akan tetapi pada tahap awal mereka diberikan bantuan sebagai stimulus bagi usahanya setelah berhasil dan mereka akan memperoleh bantuan kembali sesuai dengan kredibilitas mereka dalam menyelesaikan tanggungannya.

Secara eksternal, hambatan dalam pelaksanaan Program P4K tidak cukup berarti. Program P4K meskipun secara prinsip menyalurkan bantuan keuangan, tetapi berbeda dengan Lembaga Keuangan Formal pada umumnya. Suku bunga yang ditetapkan juga sangat lunak 6 % per tahun. Disamping itu masyarakat juga dapat memilih mekanisme pengembalian sesuai dengan kemampuan pengembalian

usahanya sesuai dengan suku bunga yang telah disepakai.

Pembahasan Umum

Masyarakat pedesaan, terutama yang kondisi ekonominya dalam keadaan lemah atau dalam ekonomi subsistem, maka keterlibatan setiap anggota keluarga dalam melakukan pekerjaan merupakan salah satu alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga, yaitu dengan jalan melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan nafkah. Isteri sebagai salah satu anggota keluarga juga tidak terlepas untuk melakukan pekerjaan di luar rumah, dalam arti bekerja untuk mencari tambahan penghasilan. Dengan demikian kaum wanita di pedesaan mempunyai dua peranan yaitu di samping sebagai ibu rumah tangga yang bergerak di sektor domestik, mereka juga berperan/bergerak di sektor publik, meskipun tidak dapat dikatakan seluruhnya (sebagian besar). Dengan adanya keterlibatan setiap anggota keluarga untuk melakukan pekerjaan yang langsung menghasilkan, hal ini diharapkan selain untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga, membantu atau meringankan beban suami dalam mencari nafkah, juga dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

Kontek di atas memberikan gambaran mengapa Program P4K banyak diikuti oleh kaum Wanita dari pada kaum laki-laki, walaupun ada laki-laki yang ikut program P4K maka peranan mereka tidaklah menonjol hal ini berkaitan dengan sikap laki-laki desa yang lebih mengutamakan gengsi atau perilaku acuh-tak-acuhnya. Berbicara tentang keluarga, kita tidak akan terlepas berpikir tentang interaksi individu yakni suami, isteri dan anak untuk memenuhi tujuan tertentu, yaitu terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia. Keluarga pada hakekatnya dapat diartikan sebagai:

“Sebagai suatu kelompok pertalian nasab keluarga yang dapat dijadikan tempat

interaksi antara suami dan isteri serta merupakan tempat untuk membimbing anak-anaknya, dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Apabila (diyakini) suatu masyarakat merupakan perjuangan hidup, maka manusia harus dapat menemukan berbagai keserasian cara yang dapat dilakukan saling terikat untuk pembinaan dan pengembangan anak serta menjalankan fungsi dari keluarga” (Sholih, 1986:12).

Keluarga pada hakekatnya adalah merupakan suatu kesatuan individu kecil yang terbentuk atas berbagai ciri khusus, yakni adanya keterikatan garis keturunan darah. Keluarga pada umumnya terdiri dari suami, isteri dan anak-anak mereka. Dalam upaya kelangsungan hidup suatu keluarga, masing-masing unsur dalam keluarga mempunyai hak, tugas dan kewajiban yang menuntut adanya saling pengertian, saling toleransi, saling menunjang dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga. Dijelaskan oleh Hutabarat (1981) antara lain sebagai berikut : “Daya upaya menuju keluarga sejahtera, apabila keluarga dapat memenuhi hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Dalam hal ini setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap keluarga.”

Sejalan dengan arah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan keluarga diorientasikan kepada pola kehidupan keluarga sejahtera, di mana dapat terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual, yang antara keduanya berjalan serasi, selaras dan seimbang. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah :

“Keluarga sejahtera yakni keluarga yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan material spiritual. Kebutuhan material adalah kebutuhan sandang, pangan, perumahan, biaya kebutuhan hidup, pendidikan dan lain-lain. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk menghayati agama, falsafah, ilmu pengetahuan, seni budaya dan sebagainya. Bilamana kita telah mencapai keseimbangan antara kebutuhan hidup material

dan spiritual, maka barulah kita bisa mencapai kehidupan yang kita idamkan” (Hutabarat, 1981).

Sedangkan menurut Sholih (1986), keluarga sejahtera dan bahagia digambarkan sebagai berikut :

“Kebahagiaan itu lebih menggambarkan suatu keadaan/ situasi yang mengandung nilai-nilai psikologis di dalam suatu kehidupan, sehingga dalam situasi tersebut individu dapat memperoleh kepuasan fisik maupun psikis. Kesejahteraan menggambarkan kemajuan atau kesuksesan di dalam hidup baik secara material, mental spiritual dan sosial secara seimbang.”

Berkaitan dengan konsep keluarga sejahtera, maka salah satu unsur yang dapat dijadikan suatu indikasi adalah sampai sejauh mana kerjasama antara suami dan isteri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dilihat dari segi spiritual, maka isteri mempunyai hak dan kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga maupun terhadap dirinya. Demikian pula dari segi material, maka isteri mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi (membantu) kebutuhan material keluarga. Dengan demikian dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga tidak hanya menggantungkan diri pada suami. Salah satu hal kelebihan Program P4K adalah Program ini tidak membatasi diri dengan faktor Gender atau status mereka dalam keluarga. Semua masyarakat dengan mekanisme kelompoknya layak untuk memperoleh bantuan demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Dengan demikian jelaslah, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut yaitu terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah terpenuhinya hak dan kewajiban yang seimbang, selaras dan serasi antara suami dan isteri. Keseimbangan hak dan kewajiban tersebut adalah diwujudkan dalam bentuk sikap tenggang rasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Sholih (1986), sebagai berikut:

“Bahwa setiap warga negara Republik Indonesia harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mengenal, saling mencintai dan bersikap tenggang rasa. Dalam keluarga suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga dan isteri wajib memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.”

Sebagai manifestasi dari hak dan kewajiban isteri dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual keluarga adalah direfleksikan dalam bentuk upaya kerja. Upaya kerja isteri ini mempunyai berbagai kecenderungan motivasi, yang antara lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga, untuk menambah penghasilan keluarga maupun membantu/meringankan beban suami mencari nafkah dan sebagainya.

Masalah wanita merupakan bagian integral dalam masyarakat. Bagaimana mungkin soal wanita dapat dipisahkan dari soal laki-laki, anak-anak, remaja dan orang tua. Para pemimpin berseru, negara tak akan maju bila wanitanya tidak maju. Sedangkan program yang ditujukan untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat seperti program-program kependudukan, kesehatan dan pendidikan termasuk Program P4K banyak tergantung pada partisipasi wanita untuk keberhasilannya. Wanita adalah pemegang posisi sentral dalam keluarga dan dalam satuan yang lebih besar sebagai pemegang posisi sentral dalam masyarakat (Suryakusuma, 1981).

Dalam bidang pertanian dan komunitas perdesaan pada umumnya perekonomian tidak tergantung pada aktivitas laki-laki sebagai kepala rumah tangga, justru kaum wanitanya dari segi jumlah lebih banyak yang beraktivitas dalam usaha lokal dan pertanian. Dalam hal ini tidak berarti kaum laki-laki banyak yang menganggur, akan tetapi dengan kesempatan yang dimiliki mereka banyak

yang menggantungkan penghasilan yang jauh dari rumah atau urban ke kota secara musiman. Dominasi wanita dalam bidang pertanian di daerah pedesaan bukan karena sistem kekuasaan mengharuskan demikian, akan tetapi lebih dikarenakan faktor alam, karena hanya di bidang pertanian mereka dapat beraktivitas membantu suami atau orang tua dalam mencari penghasilan.

Integrasi wanita dalam pembangunan akan mengharuskan diperluasnya kegiatan mereka agar dapat meliputi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Mereka harus memperoleh latihan teknis yang diperlukan untuk membuat sumbangannya lebih efektif di bidang produksi, dalam mencapai keluarga yang sejahtera.

Tingkat pendapatan yang relatif rendah pada sebagian masyarakat (yang berada dalam posisi ekonomi subsistem) memaksa kaum wanita untuk ambil bagian dalam pekerjaan, "menggali" sumber pendapatan lain. Berbagai pekerjaan dilakukan wanita sesuai dengan ketrampilannya dan pendidikannya. Selain itu sarana ekonomi yang tersedia juga mempunyai kecenderungan mempengaruhi keterlibatan wanita bekerja. Hal ini dijelaskan dalam suatu pendapat yang mengatakan: "Bahwa sarana ekonomi desa sangat menentukan apakah isteri ikut mencari pencaharian (sebagai tambahan) dalam bidang yang sama seperti suami atautkah akan mencoba keuntungan dalam bidang lain"

KESIMPULAN DAN SARAN

Program P4K sebagai upaya pemberdayaan kaum miskin pedesaan dengan pemberian bantuan modal, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk membuka usaha baru dan industri kecil lokal.

Keberhasilan Program P4K di Kabupaten Jombang, memiliki ciri khas tersendiri yaitu Program P4K banyak diikuti kaum Perempuan petani, sehingga kemam-

puan petani dalam memanfaatkan dan menyerap dana bantuan P4K sangat tinggi ditunjukkan banyak KPK yang antri untuk memperoleh bantuan atau peningkatan dana bantuan.

Orientasi Pembangunan dengan tujuan memberdayakan masyarakat berhasil dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam masyarakat. Keberhasilan Program P4K di Kabupaten Jombang tidak lepas dari partisipasi dan komitmen yang tinggi Pemerintah dan Masyarakat untuk melakukan pembinaan terus menerus dan berkelanjutan, di samping aspirasi dan inisiatif masyarakat diutamakan dalam pelaksanaan Program P4K.

Inisiatif petani dalam memanfaatkan Program P4K sangat tinggi dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang mandiri dan muncul tanpa campur tangan PPL yang berlebihan.

Antara KPK yang terbentuk dan Mantri Pertanian (PPL) terjadi hubungan yang saling menguntungkan karena kesadaran Petani dalam membentuk KPK-KPK baru.

Para petani dengan bantuan P4K banyak yang melibatkan anggota keluarga lain untuk membentuk KPK-KPK guna membentuk usaha baru di luar Bidang Pertanian.

Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Jombang agar pelaksanaan P4K berjalan baik dengan menempatkan PPL (mantri pertanian) yang bertugas melaksanakan Binaan kepada KPK dengan prinsip sesuai dengan beban tugas dan kemampuannya.

Pelaksanaan Program P4K telah memasuki tahap ke-III dan secara keseluruhan tidak terjadi penyimpangan yang berarti, kondisi sosial masyarakat yang religius dan tokoh masyarakat berperan dalam terlaksananya P4K di Kabupaten Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abar, Akhmad Zaini. 1990, Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru. CV Ramadhani, Solo.
- _____, 1991, Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 1998, Ekonomi politik dalam bisnis Indonesia Era Orde Baru, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Bryant, Carolie dan White, Louise G. 1987, Manajemen Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1985, Demokrasi di Indonesia (kumpulan karangan), PT Utama, Jakarta.
- Chambers, Robert. 1983, Rural Development Putting The Last First. Copublished in the US with John Wiley dan on, Inc, New York, 1983, p 112
- Cohen, J. M. Dan Uphoff, N.T. 1997, Rural Development Participation. RD CCIS, Cornell University Press.
- Freks, George. 1991, Partisipation in Development Activities at The Local Level. Case Studies From a Sri Lankan Village, Wageningen.
- Friedman, John. 1992, Empowerment; The Politics of alternative development, Cambridge Mass, Blackweel Publisher.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES, Jakarta.
- Mubyarto. 1994, Kewaspadaan Masyarakat Desa Tertinggal. P3PK-UGM. Aditive Media, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 1990, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Rineka Ciota, Jakarta.
- Pollard, A. H. Yusuf, Farhad, Pollard, G.N. 1982, Teknik Demografi. Bina Aksara, Jakarta.
- Pranaka dan Vidhyandika Moeljarto, 1996, Pemberdayaan (Empowerment), dalam Pemberdayaan, konsep, kebijakan dan implementasi, CSIS, Jakarta.
- Riyadi, Soeprpto, R. 1997, Status dan Peran Elit Agama Dalam Proses Pembangunan. Disertasi, PT. Dinar Wijaya, Brawijaya Univer sity Press.
- Sartono, Kartodirjo. 1987, Transformasi Struktural di Pedesaan, Beberapa pokok permasalahan dalam Buku Prospek Pedesaan, P3PK-UGM, Yogyakarta.
- Soedjito S. 1972, Sosiologi Pembangunan. PT Gunung Agung, Jakarta.
- Soetrisno, Loekman. 1995, Member dayakan Rakyat Dalam Pembangunan Indonesia, P3PK-UGM, Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2001, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Semi nar Strategi Pembangunan Nasional Kagama, Lemhanas, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi. 1990, Keanekaragaman Kebudayaan, Strategi Pembangunan dan Transformasi Orang Irian Jaya ke Dalam Masyarakat Indonesia. Mimeo, Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 1994, Perangkap Kemiskinan. Airlangga University Press, Surabaya.
- Uphoff Norman, 1995, Grassroots Organization and NGOs in Rural Development: Opportunities with Diminishing States ang Expanding Markets, dalam Market and Civil Organization, edited by Janvry et al, Mac Millan Press, London.
- Widyatmadja.Yosef P, 1992, Peranan partisipasi rakyat dalam pembangunan, dalam UPKM FE UKSW, Yang terdesak yang berkumpul, Satya Wacana, Semarang.